

**ANALISIS EKONOMI POLITIK DAN KEUANGAN
TERHADAP PERATURAN DAERAH SYARIAH
DI KOTA MOJOKERTO**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magister dalam
Program Studi Ekonomi Syariah



Oleh

FARISUL HAQ
NIM. F02417115

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Farisul Haq

NIM : F02417115

Program : Magister (S2) Prodi Ekonomi Syariah

Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS yang berjudul “Analisis Ekonomi Politik dan Keuangan Terhadap Penerapan Peraturan Daerah Syariah di Kota Mojokerto” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 03 Juli 2019

Saya yang menyatakan,




FARISUL HAQ
NIM. F02417115

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis berjudul “Analisis Ekonomi Politik dan Keuangan Terhadap Penerapan Peraturan Daerah Syariah di Kota Mojokerto” yang ditulis oleh Farisul Haq ini telah disetujui pada tanggal 03 Juli 2019

Oleh :

PEMBIMBING



Dr. Khotib, M.Ag
NIP. 196906082005011003

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

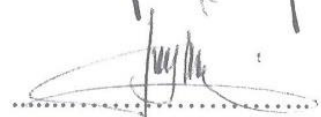
Tesis berjudul “Analisis Ekonomi Politik dan Keuangan Terhadap Penerapan Peraturan Daerah Syariah di Kota Mojokerto” yang ditulis oleh Farisul Haq ini telah diuji dalam Ujian Tesis
Pada tanggal 18 Juli 2019

Tim Penguji :

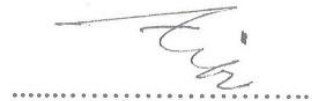
1. Dr. H. Djoko Subagyo, MM (Ketua/Penguji)



2. Dr. Mugiyati, M.E.I (Sekretaris/Penguji)



3. Dr. Khotib, M.Ag (Pembimbing/Penguji)



Surabaya, 30 Juli 2019

Direktur,



Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag
NIP. 196004121994031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Farisul Haq
NIM : F02417115
Fakultas/Jurusan : Pascasarjana/Ekonomi Syariah
E-mail address : farisulhaq.368@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☐ Skripsi ☒ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Analisis Ekonomi Politik dan Keuangan Terhadap Penerapan Peraturan Daerah Syariah di Kota Mojokerto

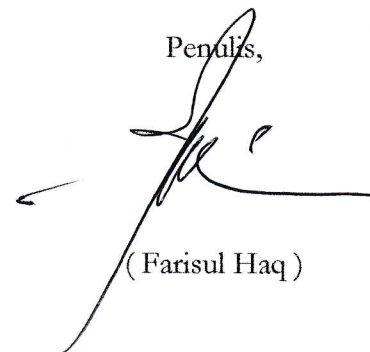
beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 07 Agustus 2019

Penulis,


(Farisul Haq)

ABSTRAK

Farisul Haq, 2019. Analisis Ekonomi Politik dan Keuangan Terhadap Penerapan Peraturan Daerah Syariah di Kota Mojokerto.

Hadirnya undang-undang otonomi daerah menjadi alasan fundamental terbitnya Peraturan Daerah Syariah di Kota Mojokerto khususnya dalam bidang ekonomi dan keuangan sebagai bentuk pemenuhan kewajiban pemerintah daerah dalam mensejahterakan rakyatnya. Penerapan Peraturan Daerah Syariah di Kota Mojokerto diharapkan mampu melahirkan instrumen produktif pengentasan kemiskinan melalui optimalisasi UMKM.

Penelitian ini mencoba mendeskripsikan analisis ekonomi politik dan keuangan terhadap penerapan Perda Syariah di Kota Mojokerto dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini mendeskripsikan penerapan Perda Syariah tentang BPRS Kota Mojokerto yang membantu masyarakat mendapatkan akses keuangan syariah, kemudian Perda Syariah tentang pengelolaan ZIS dan pemberdayaan UMKM sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mengoptimalkan potensi ZIS dan komitmen pemerintah dalam menghadirkan ekonomi kerakyatan bagi masyarakat Kota Mojokerto.

Penerapan Perda Syariah di Kota Mojokerto dalam bidang ekonomi dan keuangan melahirkan sebuah Program Usaha Syariah (PUSYAR) yang mampu menjadi instrumen produktif pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan 1.114 UMKM yang ada di wilayah Kota Mojokerto dengan total dana yang telah didistribusikan mencapai angka Rp. 8.956.909.375. Sedangkan berdasarkan tinjauan ekonomi politik dan keuangan, penerapan Perda Syariah di Kota Mojokerto melibatkan peran aktor-aktor politik pemerintah Kota Mojokerto seperti BPRS, BAZNAS, DISKOMINAKER, DISPERINDAG, dan MES yang berusaha melahirkan langkah kongkrit mempersempit kesenjangan yang terjadi di masyarakat Kota Mojokerto melalui kebijakan ekonomi dan keuangan daerah.

Kata Kunci : Ekonomi Politik dan Keuangan, Peraturan Daerah Syariah

ABSTRACT

Farisul Haq, 2019. Political and Financial Economic Analysis of the Application of Sharia Regional Regulations in the City of Mojokerto.

The presence of the regional autonomy law was the fundamental reason for the issuance of Sharia Regional Regulations in Mojokerto City, especially in the economic and financial fields as a form of fulfilling the obligations of regional governments in the welfare of their people. It is expected that the application of Sharia Regional Regulations in Mojokerto City will produce productive instruments for poverty alleviation through the optimization of MSMEs.

This study attempts to describe the political and financial analysis of the application of Sharia Regulations in Mojokerto City by using a qualitative descriptive research method.

The results of this study describe the application of Sharia Perda concerning BPRS Kota Mojokerto which helps people gain access to Islamic finance, then Sharia Regulations on the management of ZIS and empowerment of MSMEs as a form of government commitment to optimizing the potential of ZIS and government commitment in presenting populist economy for the people of Mojokerto City.

The implementation of Sharia Regulations in the City of Mojokerto in the economic and financial fields gave birth to a Sharia Business Program (PUSYAR) which was able to become a productive instrument of poverty alleviation through the empowerment of 1,114 MSMEs in the Mojokerto City area with a total of Rp. 8,956,909,375. Meanwhile, based on political and financial economic reviews, the application of Sharia Regulations in Mojokerto City involved the role of political actors in Mojokerto City Government such as BPRS, BAZNAS, DISKOMINAKER, DISPERINDAG, and MES who tried to bring concrete steps to narrow the gaps in Mojokerto City through economic policy and regional finance.

Key Words : *Political Economy and Financial, Sharia Regulations*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PRASYARAT	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI	xi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	12
C. Rumusan Masalah	13
D. Tujuan Penelitian	13
E. Kegunaan Penelitian	14
F. Penelitian Terdahulu	14
G. Metode Penelitian	18
H. Sistematika Pembahasan	22
BAB II : LANDASAN TEORI	24
A. Keuangan Publik Islam	24
B. Ekonomi Politik Islam	34
C. Kebijakan Pemerintah Sektor Publik	39
D. Kewenangan Pemerintah dalam Membuat Peraturan Daerah	42
E. Penerapan Syariah Islam dalam Bingkai Otonomi	46

DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1	: Jumlah Penerima Manfaat Pusyar 2012 – 2018	81
Grafik 4.2	: Rekapitulasi Realisasi Pencairan Pusyar 2012 – 2018	82

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Diskursus internalisasi dan formalisasi syariat Islam dalam kegiatan berbangsa dan bernegara mulai banyak didiskusikan pasca runtuhnya rezim orde baru pada tahun 1998, hal itu tentunya merupakan oase baru yang tidak hanya melahirkan arus balik gerakan reformasi dalam panggung demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Internalisasi syariat Islam kini hadir mewarnai di setiap sektor baik pemerintah, pendidikan, ekonomi, sosial, dan politik.

Dinamika sosial politik di Indonesia dari waktu ke waktu telah mempengaruhi perjalanan politik hukum Islam di dalamnya. Arah politik hukum Islam pada periode reformasi menghendaki penerapan hukum Islam di Indonesia dilakukan dalam bentuk penyusunan Peraturan Daerah (PERDA) yang memiliki substansi tipikal Islam. Hingga saat ini, dari 512 kabupaten/kota di Indonesia, kurang lebih sebanyak 64 kabupaten dan kota di 15 provinsi di Indonesia telah menerbitkan dan menerapkan Peraturan Daerah (PERDA) bernuansa Syariah di yurisdiksi masing masing.

Penerapan Peraturan Daerah (PERDA) bernuansa syariah antara lain disebabkan oleh kegagalan Pemerintah Pusat dalam menyelesaikan permasalahan sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia, sehingga syariat

Tabel 1.1 : Populasi Umat Muslim Terbesar di 10 Negara Tahun 2010

No	Negara	Jumlah Penduduk Muslim
1	Indonesia	202.867.000
2	Pakistan	174.082.000
3	India	160.945.000
4	Bangladesh	145.312.000
5	Mesir	78.513.000
6	Nigeria	78.056.000
7	Iran	73.777.000
8	Turki	73.619.000
9	Algeria	34.199.000
10	Maroko	31.993.000

No	Negara	Jumlah Penduduk Muslim
1	Indonesia	202.867.000
2	Pakistan	174.082.000
3	India	160.945.000
4	Bangladesh	145.312.000
5	Mesir	78.513.000
6	Nigeria	78.056.000
7	Iran	73.777.000
8	Turki	73.619.000
9	Algeria	34.199.000
10	Maroko	31.993.000

Sumber : <http://www.pewforum.org/2011/01/27/the-future-of-the-global-muslim-population/>, (*Data diolah*)

Hooker, *Indonesian Syari'at: Defining a National School of Islamic Law* (Singapore: Institute of Southeast Asia Studies, 2008), 54.

Why do Indonesian Politicians Promote Sharia Law? An Analytic Framework For Muslim
 y Democracies. *Journal of Third World Quarterly*, 2016, 1-3.

² Pisani, *Why do Indonesian Politicians Promote Sharia Law? An Analytic Framework For Muslim Majority Democracies*. Journal of Third World Quarterly, 2016, 1-3.

² Pisani, *Why do Indonesian Politicians Promote Sharia Law? An Analytic Framework For Muslim Majority Democracies*. Journal of Third World Quarterly, 2016, 1-3.

Secara legal formal, penerbitan perda-perda tersebut bertujuan untuk menghidupkan kembali kebudayaan lokal masing-masing daerah. Para sejarawan mencatat bahwa dampak penyebaran Islam ke Nusantara melalui berbagai media seperti budaya dan sufisme adalah penyatuan ajaran-ajaran Islam ke dalam budaya lokal.³ Hal ini menjadi alasan fundamental tidak terpisahkannya syariat Islam dari budaya lokal dan identitas sebagian etnis di Indonesia.

Pemerintah dalam aspek negara bertujuan untuk mempertinggi kemakmuran rakyatnya. Sungguh merupakan kewajiban pemerintah dalam mensejahterakan rakyat di setiap daerahnya. Hal ini sesuai dengan amanat

[illegible]

Adanya paradigma desentralisasi dalam pemenuhan kewajiban pemerintah melahirkan sebuah konsensus otonomi. Keberadaan otonomi daerah di Negara Republik Indonesia telah menjadi konsensus nasional sesuai dengan amanat UUD 1945 Pasal 18 tentang Pemerintah Daerah. Undang-Undang Dasar 1945 dan Amandemennya, Pasal 18 ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7, Pasal 18A ayat 1, dan 2, Pasal 18B ayat 1, dan 2. Pemikiran perlu adanya keberadaan otonomi daerah di Indonesia telah dilontarkan oleh para pembentuk amandemen UUD 1945 tanpa ada kontra argumentasi. Pengadaan otonomi daerah untuk menjamin efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan sebagai dasar memperluas pelaksanaan demokrasi dan menjadi instrumen dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan penjelasan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, dinyatakan bahwa daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi dan daerah provinsi akan dibagi pula dalam daerah berdasarkan penjelasan Pemerintahan Daerah yang lebih kecil dan berasaskan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam

⁴ Pembukaan UUD 1945.

Sejak disahkannya Undang-Undang di atas, Pemerintah Daerah memiliki legalitas kewenangan yang luas dalam pengelolaan di daerahnya. Rumadi berpendapat, bahwa dengan adanya kewenangan yang luas inilah, maka implementasi Peraturan Daerah (PERDA) Syariah marak terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Peraturan daerah yang kemudian dikenal dengan PERDA Syariah Islam. Secara umum, PERDA syariah sering dimaknai sebagai PERDA yang diambil dari ketentuan-ketentuan legal syariah Islam, baik yang bersifat tekstual maupun substansial ajarannya.⁵

PERDA bernuansa syariah, atau lebih dikenal sebagai PERDA “syariah”, adalah produk hukum pemerintah daerah di beberapa propinsi, kota, dan kabupaten di Indonesia yang terinspirasi dari syariah dalam Islam.⁶ Syariah di sini dapat kita definisikan sebagai sekumpulan aturan bagi umat Islam yang diinterpretasikan dari Al-Qur`an dan Hadits. Hal ini sejalan dengan firman Allah yang tertera dalam QS. Al-Maidah ayat 48.

⁵ Rumadi, *PERDA Syariat Islam: Jalan Lain menuju Negara Islam?*, Tashwirul Afkar, Jurnal Refleksi Pemikiran Keagamaan dan Kebudayaan; *PERDA Syariat Menuai Makna*, Edisi No 20 tahun 2006, 03.

⁶ Huda, *Keuangan Publik Islam; Pendekatan Teoritis dan Sejarah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 1-3.

menggambarkan Syariah Islam secara utuh dan menyeluruh (*kāmil dan syāmil*), meskipun dengan redaksi yang sangat global dan ringkas.⁷

Tabel 1.2 : Kategorisasi PERDA Syariah di Indonesia

No	Kategori PERDA	Jumlah
1	Moralitas	170
2	Zakat	62
3	Keimanan	59
4	Keuangan Islam	39
5	Pendidikan Islam	27
6	Busana Muslim	25
7	Lainnya	40
JUMLAH		422

Sumber : <http://www.jdi.h.setjen.kemendagri.go.id/>, (Data diolah)

Pada tahun 2016 terdapat kurang lebih 422 PERDA Syariah terformalisasi dan terdaftar di Direktorat Jendral Peraturan Perundang-Undangan. Sebanyak 358 butir peraturan tersebut lahir dalam bentuk “Peraturan Daerah” (yaitu peraturan lokal dikeluarkan atas persetujuan bersama antara eksekutif dan legislatif daerah) dan 64 peraturan lahir dalam bentuk non-PERDA, hal tersebut meliputi; Peraturan Kepala Daerah” (PERBUP/PERWALI), Instruksi Kepala Daerah, atau Surat Edaran Kepala Daerah.

Undang-undang Otonomi Daerah dijadikan oleh beberapa daerah sebagai pintu masuk untuk menerapkan Syariat Islam. Jawa timur termasuk

⁷ Masykuri Abdillah dkk, *Formalisasi Syariat Islam di Indonesia* (Jakarta: Renaisan, 2005), 13.

[illegible]

Tabel 1.3 : Data PERDA dan PERWALI Syariah di Kota Mojokerto

No	PERDA	Tahun	Keterangan
1	PERDA No. 3	2010	Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh
2	PERDA No. 10	2013	Pendirian BPR Syariah
3	PERDA No. 13	2016	Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Air Minum Maja Tirta dan PT. BPR Syariah
4	PERDA No. 7	2009	Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
5	PERWALI No. 14	2013	Pedoman Teknis Pengumpulan dan/atau Pemungutan Zakat, Infak dan Sedekah

Sumber : JDIH Kota Mojokerto, (*Data diolah*)

Mengingat sebagian besar penduduk di Kota Mojokerto beragama Islam, hal ini berdasarkan Program Kerja Badan Amil Zakat Kota Mojokerto Tahun 2012 yang menunjukkan bahwa penduduk yang beragama Islam di Kota Mojokerto sebanyak 94.863 jiwa (86,56 %).⁸ Besarnya populasi ummat Islam yang menjadi potensi keberadaan PERDA syariah di Kota Mojokerto dapat dilaksanakan secara optimal, lahirnya PERDA syariah di Kota Mojokerto merupakan salah satu dimensi pemberdayaan potensi keislaman masyarakat Kota Mojokerto yang diejawentahkan melalui hasil elaborasi pemerintah dengan masyarakat dalam sebuah

⁸ BAZ Kota Mojokerto, *Bulletin Al-Ashnaf Edisi 10 Triwulan II 2013*, (Mojokerto: Creative Generation, 2013), 08.

Internalisasi syariat Islam dalam sebuah kebijakan legal di Kota Mojokerto juga dinilai unik, pasalnya formalisasi tersebut melahirkan sebuah instrumen produktif yang dapat mempersempit kesenjangan ekonomi masyarakat. Melalui rentetan PERDA Syariah di Kota Mojokerto tersebut, terciptalah pola sinergi antara BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) Kota Mojokerto dan BAZ (Badan Amil Zakat) Kota Mojokerto untuk memberdayakan UMKM di daerah Kota Mojokerto, program ini bertajuk Program Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR). Sinergi produktif ini tercipta lantaran Kota Mojokerto memiliki Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2009 tentang pemberdayaan UMKM, dan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2013 tentang Pendirian BPR Syariah serta Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2010 tentang pengelolaan zakat, infak, dan sedekah yang kemudian didukung dengan adanya Peraturan Walikota No. 14 Tahun 2013 tentang pedoman teknis pengumpulan zakat, infak, dan sedekah.

n teknis pengumpulan zakat, infak, dan sedekah.

Pemberdayaan UMKM di Kota Mojokerto merupakan salah satu program yang dilakukan pemerintah Kota Mojokerto dalam rangka meningkatkan perekonomian. Pasalnya, di wilayah Kota Mojokerto, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor yang dominan. Makanan dan minuman adalah yang paling banyak dihasilkan oleh UMKM di Kota Mojokerto dengan total usaha sebesar 4.100 unit usaha menyerap tenaga kerja sebanyak 1.633 orang dengan omset sebesar Rp. 53.094.792.000. Sementara, produksi

Kota Mojokerto yang paling terkenal adalah usaha alas kaki dengan total usaha sebesar 399 unit yang mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 4.133 orang dengan total nilai produksi paling besar yaitu Rp. 287.050.208.800. Namun, untuk usaha batik tulis dan cap adalah yang paling sedikit dengan hasil total nilai produksi sebesar Rp. 624.600.000 dan total usaha sebesar 66 unit yang hanya mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 89 orang.

Selain itu, pada UMKM Kota Mojokerto terdapat usaha *handicraft* yaitu berupa pembuatan aksesoris, kerajinan tas, sulam pita, dan kerajinan bambu yang mulai banyak diminati masyarakat sehingga menghasilkan total nilai produksi sebesar Rp. 4.576.700.000 dengan 52 unit usaha yang mampu menyerap tenaga kerja sebesar 207 orang. UMKM Kota Mojokerto lainnya adalah usaha miniatur perahu yang unik dan hanya ada disalah satu daerah Kota Mojokerto yakni Kelurahan Miji yang hanya memiliki 13 unit usaha dengan 35 tenaga kerja namun memiliki total nilai produksi yang besar yaitu sebesar Rp. 1.254.800.000.

Namun demikian, perkembangan UMKM Kota Mojokerto belum dapat berkembang dengan pesat. Hal tersebut dikarenakan masih sedikitnya unit usaha yang berdiri serta kurangnya tenaga kerja sehingga mengakibatkan total nilai produksi yang dihasilkan masih belum maksimal. Oleh karena itu, diperlukan program-program khusus yang diberikan kepada para pengusaha mikro, kecil dan menengah sebagai upaya dalam mendukung perkembangan UMKM Kota Mojokerto di masa yang akan datang.

diharapkan mampu memberikan solusi terhadap permasalahan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Mojokerto yang diyakini memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi Kota Mojokerto karena mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan mempengaruhi pendapatan masyarakat sehingga mampu mengurangi pengangguran dan kemiskinan di Kota Mojokerto.

Penetapan kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah sangatlah beragam, yaitu bidang produksi, distribusi, konsumsi, ekonomi, kebijakan fiskal, dan lain sebagainya. Fokus dari penelitian ini terhadap persoalan yang dimunculkan, maka penelitian ini hanya berfokus pada penerapan Perda Syariah dalam kebijakan ekonomi dan keuangan di Kota Mojokerto.

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut :

3. Pemberdayaan UMKM di Kota Mojokerto belum dilaksanakan dengan optimal
4. Penerapan Peraturan Daerah Syariah di Kota Mojokerto sebagai upaya menghadirkan instrumen produktif pemberdayaan UMKM
5. Lahirnya Program Pusyar membantu UMKM di Wilayah Kota Mojokerto dalam kemudahan permodalan

Adanya keterbatasan yang dimiliki peneliti baik dalam hal kemampuan, dana, waktu, dan tenaga maka penelitian ini hanya membatasi masalah dan berfokus pada Peraturan Daerah Syariah dalam kebijakan ekonomi dan keuangan yang diterapkan di Kota Mojokerto.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang berangkat dari paparan latar belakang masalah di atas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Penerapan Peraturan Daerah (PERDA) Syariah dalam Kebijakan Ekonomi dan Keuangan di Kota Mojokerto ?
2. Bagaimana Tinjauan Ekonomi Politik dan Keuangan Terhadap Penerapan Peraturan Daerah (PERDA) Syariah di Kota Mojokerto ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penulisan dalam penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Penerapan Peraturan Daerah (PERDA) Syariah dalam Kebijakan Ekonomi dan Keuangan di Kota Mojokerto
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Tinjauan Ekonomi Politik dan Keuangan Terhadap Penerapan Peraturan Daerah (PERDA) Syariah di Kota Mojokerto

Adapun manfaat yang nantinya diharapkan dapat dicapai dalam penulisan karya tulis ini adalah :

Sebagai pengembangan keilmuan di Prodi Magister Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya, serta memberikan tambahan informasi bagi pembaca dan bahan rujukan penelitian yang akan mengembangkan penelitian sejenis.

Sebagai tambahan informasi dan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan dan tindakan oleh pemerintah yang telah menerapkan PERDA syariah untuk melakukan pengelolaan dalam sektor ekonomi dan keuangan melalui instrumen sistem perekonomian Islam.

Penelitian ini berjudul “Analisis Ekonomi Politik dan Keuangan Terhadap Penerapan Peraturan Daerah Syariah di Kota Mojokerto” tentunya

	<p><i>dalam Peraturan Daerah Syariah di Indonesia</i> (Habib Muhsin Syafingi, Jurnal Pendecta Vol 7 No 2 Juli 2012)</p>		<p>nilai Islam dalam PERDA syariah di Indonesia, terbagi menjadi dua bagian yakni: konten dari ajaran Islam sendiri (syari'ah) dan juga nilai-nilai kearifan lokal yang dianut dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, munculnya PERDA-PERDA syariah tersebut juga dimaksudkan untuk melaksanakan ketentuan hukum Islam.</p>	<p>internalisasi nilai-nilai hukum Islam pada Peraturan Daerah.</p> <p>▪ Perbedaan : Penelitian ini lebih fokus pada dampak dari internalisasi nilai Islami pada peraturan daerah yang ada. Tidak berawal pada mekanisme politik atau pun ekonomi yang terjadi di daerah.</p>
3	<p><i>Intervensi Negara Dalam Perekonomian: Melacak Epistemologi Politik Ekonomi Islam.</i> (Nafis Irkhani, Jurnal At-Tahrir Vol</p>	<p>Metode Kualitatif Studi Pustaka</p>	<p>Dalam bidang ekonomi politik Islam, rekonstruksi epistemologi tersebut adalah dengan memasukkan nilai-nilai dan etika yang diambil dari worldview Islam, ke</p>	<p>▪ Persamaan : Meneliti proses keterkaitan antara Politik Ekonomi Islam terhadap kebijakan</p>

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara terstruktur dalam sebuah penelitian masalah sehingga dapat disimpulkan hasil sebuah penelitian tersebut.⁹ Metode penelitian juga dapat diartikan sebagai sebuah langkah dalam mencari, merumuskan, menggali data, menganalisa, membahas, kemudian menyimpulkan masalah dalam penelitian.¹⁰

1. Desain Penelitian

Desain penelitian ini secara keseluruhan merupakan jenis karya tulis deskriptif (*descriptive research*) dengan penelitian kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang dan perilaku yang diamati, didukung dengan studi literatur atau studi kepustakaan berdasarkan pendalaman kajian pustaka berupa data dan angka, sehingga realitas dapat dipahami dengan baik.¹¹

Dalam penyusunan penelitian ini, nantinya penulis akan menjabarkan tentang realisasi penerapan Peraturan Daerah Syariah di Kota Mojokerto serta analisisnya melalui perspektif ekonomi politik dan keuangan.

Dengan rumusan masalah yang telah tersusun, maka penulis akan menggunakan pendekatan penulisan secara kualitatif untuk

⁹ Lexy J Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), 03.

¹⁰ H. M. Musfiqon, *Panduan Lengkap Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2012), 14.

¹¹ Lexy J Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), 05

mendapatkan jenis data yang bersifat deskriptif. Kemudian penulis akan berusaha melakukan eksplorasi data studi pustaka guna menjawab pembahasan masalah yang aplikatif.

2. Jenis dan Sumber Data

Dalam penulisan penelitian ini, hanya digunakan 2 (dua) jenis sumber data yaitu :

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah tempat atau gudang yang menyimpan data orisinal dan merupakan sumber-sumber dasar, yang merupakan bukti atau saksi mata.¹² Sumber data ini langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data diperoleh berupa data dokumen kebijakan peraturan daerah keuangan Pemerintah Daerah Kota Mojokerto yang tertuang dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.

b. Sumber Data Sekunder

Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari penelusuran dokumen data seperti serta media massa (surat kabar, majalah, jurnal, dan internet) serta buku-buku yang membahas masalah terkait) dan wawancara dengan beberapa pemangku kebijakan.

¹² Moh. Nasir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 9-10

c. Dokumentasi

4. Metode Analisis Data

¹⁵ Lexy J Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), 327-337

Setelah proses pengolahan data, berikutnya adalah menganalisis data dan menginterpretasikannya. Data hasil analisis tersebut diinterpretasikan atau disimpulkan untuk menjawab keseluruhan masalah yang diteliti, agar hasil analisis ini memperoleh kebenaran yang ilmiah, maka analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan memperhatikan beberapa tahapan yaitu tahap penyajian bukti atau fakta (*skeptik*) berupa variabel peraturan daerah syariah yang berkaitan dengan ekonomi dan keuangan di Kota Mojokerto, kemudian memperhatikan permasalahan yang relevan (analitik), dan tahap menimbang secara obyektif untuk berpikir logis (kritik).¹⁶

Untuk menghasilkan suatu tulisan yang teratur dan terarah, peneliti menguraikan penelitian ini dalam lima bab sebagai berikut :

[illegible]

Bab Dua berfungsi sebagai dasar kajian untuk menjawab permasalahan yang ada pada penelitian ini.

Kemudian, Bab Empat berisi analisis hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang mengacu pada rumusan masalah.

Bab Lima memuat kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran yang dapat bermanfaat bagi banyak pihak.

Menurut Al-Haritsi yang dinukil dari pendapat Abu Ubaid, kekayaan publik merupakan suatu kekayaan khusus, dimana pemerintah berhak mengatur dan mengelolanya, bahkan mendistribusikannya kepada masyarakat.⁶ Karena harta yang dihasilkan merupakan harta milik negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat, maka perlu dilakukan pengawasan dan pengaturan terhadap harta tersebut. Pengertian pengawasan harta dalam aturan harta Islam kadang tidak berbeda menurut para penulis modern dalam harta umum, yaitu mengikuti aturan-aturan, kaidah dan petunjuk tertentu yang bertujuan untuk menjaga harta umum, mengembangkan dan melindunginya, baik dalam mengumpulkan atau mengeluarkannya dan mengawasinya untuk mencegah kelalaian, dan membenarkan kesalahan agar harta umum tetap menjadi sarana untuk mewujudkan kemaslahatan ummat secara menyeluruh.⁷

Pengawasan harta dalam aturan harta Islam mempunyai peran yang penting karena ia merupakan alat untuk melindungi sumber baitulmaal dan

⁶ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 55.

[illegible]

Pengertian pengawasan dan pengaturan harta negara dalam Islam memang memiliki kesamaan dengan pengertian yang dibuat oleh para ekonom modern, namun tidak berarti memiliki kesamaan dalam semua tujuan dan cara. Karena pengawasan dan pengaturan harta dalam Islam mempunyai kelebihan dengan dasar-dasar aqidah dan akhlak yang bersumber dari Al-Quran dan Hadist. Karena itu ia mempunyai tujuan-tujuan dan cara yang tidak ada dalam sistem lain.¹⁰

Abdul Manan berpendapat bahwa kebijakan fiskal suatu negara harus sepenuhnya berdasarkan prinsip hukum dan nilai-nilai Islam, karena pada dasarnya prinsip Islam bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan yang merata dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama.¹¹

⁹ Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. (Jakarta: Granada Press, 2007), 70.

¹⁰ Jaribah bin Ahmad Al Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin Khathab*. (Jakarta: Khalifa, 2003), 620.

¹¹ M. Abdul Manan, (terj), *Ekonomi Islam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Internasa, 1992), 230.

Beberapa langkah yang mendapat perhatian Rasulullah pada masa awal pemerintah di Madinah adalah membangun masjid utama sebagai tempat/pusat kegiatan atau forum bagi para pengikut beliau, merehabilitasi kaum Muhajirin Mekkah di Madinah, menciptakan perdamaian dalam negara, menjelaskan hak dan kewajiban warga negara, membuat konstitusi negara, menyusun sistem pertahanan di Madinah, dan meletakkan dasar-dasar sistem keuangan negara yang kokoh.¹³

¹² Mustafa, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Nasution, 2007), 225.

[illegible]

diperun
bertang

pendap
kepent

(zakat)

c.id digili

Yusuf Al-Qardawi menyimpulkan, tidak bolehnya memperhitungkan pajak sebagai kewajiban zakat adalah karena yang

[illegible]

¹⁹ Nurul Huda, *Keuangan Publik Islam: Pendekatan Teoritis dan Sejarah*. (Jakarta: Kencana, 2012), 135-147, baca juga PAKEM Badan Kebijakan Fiskal KEMENKEU, *Laporan Kajian Islamic Public*. 2012, 23-24.

musafir, (6) Pembayaran untuk pembebasan kaum muslim yang menjadi budak, (7) Pembayaran tunjangan untuk orang miskin, dan lain sebagainya.²¹

Karakteristik pajak serta tunjangan sosial yang ada di sistem konvensional berbeda sama sekali dengan mekanisme yang ada dalam zakat. Penjaminan dalam mekanisme zakat merupakan prioritas utama dalam kebijakan ekonomi. Sedangkan dalam konvensional tunjangan sosial sangat tergantung pada penerimaan pajak, ketika dana pajak dirasakan tidak mencukupi, maka tunjangan tersebut bukanlah menjadi prioritas utama.

Rachbini berpendapat bahwa ekonomi politik merupakan pembelajaran ilmu yang bersifat interdisiplin, yakni terdiri atas gabungan

²¹ PAKEM Badan Kebijakan Fiskal KEMENKEU, *Laporan Kajian Islamic Public*. 2012, 26.

Sedangkan menurut Naerul yang menukil pendapat Caporaso dan Levine, ia menjelaskan bahwa ekonomi politik tidak hanya masalah sosial dan keterbelakangan, tetapi untuk memberikan saran mengenai pengelolaan masalah-masalah ekonomi kepada para penyelenggara negara. Dengan bahasa yang lebih sederhana, ekonomi politik merupakan inter-relasi di antara aspek, proses, dan institusi politik dengan kegiatan ekonomi (produksi, investasi, penciptaan harga, perdagangan, konsumsi, dan lain-lain).²³

²² Didin Rachbini, *Ekonomi Politik: Paradigma dan Teori Pilihan Publik*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 83.

²³ Naerul Edwin, *Kemiskinan dalam Perspektif Ekonomi Politik Islam*, Jurnal Islamic Economic, Volume 8, Nomer 2, Juli – Desember 2017, 172.

(*politics*) memang berlainan yaitu dalam pengertian keduanya mempunyai alat analisis sendiri-sendiri yang bahkan memiliki asumsi yang berlawanan. Oleh karena itu ekonomi politik merupakan penggabungan antara bidang ekonomi dan politik, menggabungkan dua fokus yang berbeda. Setidaknya, keduanya memiliki perhatian yang sama terhadap isu-isu sebagai berikut: mengorganisasi dan mengoordinasi kegiatan manusia, mengelola konflik, mengalokasikan beban dan keuntungan, dan menyediakan kepuasan bagi kebutuhan dan keinginan manusia.

Fase politik ekonomi sangat mempengaruhi paradigma para pengambil kebijakan. Oleh karena itu, pendekatan ekonomi politik Islam menjadi sangat penting. Persoalan kesejahteraan bangsa sangat ditentukan

Dengan latar belakang pentingnya pemikiran ekonomi Islam menjadi arus baru dalam kebijakan ekonomi nasional, maka masuknya ekonomi Islam ke dalam ranah *political economy* menjadi hal yang sangat urgen.²⁶

Kajian ekonomi politik Islam pada setiap kebijakan negara Islam merupakan hasil pengembangan dari hukum Islam dalam bidang kebijakan pengelolaan kekayaan negara. Moh. Syakir mengatakan bahwa secara teknis ekonomi politik Islam lebih dikenal dengan sebutan *Siyāsah Māliyah*. Istilah yang lain adalah *Tadakhul ad-daulah* (intervensi Negara).²⁷ Negara mengintervensi aktifitas ekonomi untuk menjamin adaptasi hukum Islam yang terkait dengan aktifitas ekonomi masyarakat secara lengkap. Negara dipandang ikut serta dalam ekonomi Islam yang mana untuk menyelaraskan

²⁷ Mohd Syakir Mohd Rosdi, *Ekonomi Politik Islam: Teori dan Falsafah*. (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2013), 7-11.

Di sisi lain, dalam kaitannya membahas “*ekonomi politik Islam*”, yang menjamin kebutuhan pokok dan memberikan kesempatan kepada individu untuk meraih kebutuhan sekunder dan tersier, dimana pertama-pertama Islam memandang seseorang sebagai manusia yang memiliki harkat dan martabat yang harus diperhatikan serta dipenuhi semua kebutuhan primernya secara menyeluruh.

[illegible]

Sebelum dibahas lebih jauh mengenai konsep kebijakan publik, kita perlu mengkaji terlebih dahulu mengenai konsep kebijakan atau dalam bahasa Inggris sering kita dengar dengan istilah *policy*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.²⁸

[illegible]

Kebijakan haruslah diartikan sebagai pernyataan kehendak yang diikuti dengan unsur pengaturan dan atau paksaan, sehingga dalam pelaksanaannya akan dapat mencapai tujuan yang dikehendaki. Di dalam kerangka itulah, pelaksanaan kebijakan memerlukan kekuasaan (*power*) dan wewenang (*authority*) yang dapat dipakai untuk membina kerjasama dan meredam serta menyelesaikan berbagai kemungkinan terjadinya konflik sebagai pencapaian kehendak.

Budi Winarno mengutip pendapat Eyeston yang memberikan pengertian kebijakan publik sebagai "Hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya". Sedangkan menurut Anderson, kebijakan

[illegible]

Kebijakan publik dapat dipandang sebagai salah kegiatan yang menjadi pilihan pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan, meski terdapat definisi yang mungkin dapat memberikan pemahaman yang cukup dalam setiap pembicaraan yang berkaitan dengan kepentingan umum.

Kebijakan publik memuat keputusan-keputusan yang dibuat oleh badan atau lembaga yang berfungsi untuk mengatur publik dan mencari jalan keluar terhadap permasalahan publik.

Secara sederhana Faried Ali merumuskan bahwa kebijakan publik adalah kebijakan yang dikembangkan oleh badan dan lembaga pemerintah dalam artian yang luas yang berarti lembaga non-pemerintahan juga secara implisit termasuk di dalamnya dengan alasan karena mereka pun juga sebagai pelaku dan faktor yang mempengaruhi.³²

³¹ Situmeang Taurusman, *Proyek Penanggulangan Kebijakan Penanganan Kemiskinan Di Perkotaan; Studi Implementasi Kebijakan Proyek Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan Di Desa Jatikerto Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang*, Jurnal Reformasi, Volume 3, Nomor 1, Januari – Juni 2013, 23.

[illegible]

Secara berkelanjutan, proses kebijakan publik dibagi menjadi tiga tahap, yaitu tahap perumusan, tahap implementasi, tahap evaluasi. Ketiga tahap tersebut berada dalam kegiatan yang berlangsung secara terus menerus yang dimulai dari isu dan akan berakhir dengan isu sehingga dalam rangka kontinuitas akan terjadi re-formulasi, re-implementasi, dan re-evaluasi kebijakan.

Menurut Bagir Manan, peraturan perundang-undangan tingkat daerah diartikan sebagai Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh

Pemerintah Daerah, baik provinsi, maupun kabupaten/kota memiliki kewenangan untuk membuat Peraturan Daerah (Perda). Dalam Pasal Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Perda adalah peraturan yang dimiliki oleh pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota.³⁴

Pertama: Prosedur pembentukan Perda. Perda dibentuk/ditetapkan oleh Kepala Daerah setempat bersama dengan DPRD. Artinya Perda yang dibuat di tingkat provinsi ditetapkan oleh Gubernur setempat bersama dengan DPRD provinsi, demikian pula di tingkat kabupaten/kota. Usul pembentukan Perda dapat dilakukan oleh Kepala Daerah sebagai Kepala Eksekutif Daerah dan oleh DPRD sebagai Legislatif Daerah. Hal ini berlaku terhadap seluruh usulan Perda kecuali rancangan Perda mengenai APBD yang harus berasal dari Kepala Daerah (eksekutif) saja. Dalam pembentukan Perda masukan dari masyarakat harus diberi ruang, baik

³⁴ Lihat Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 125.

dalam proses awal pembentukannya, maupun pada saat perumusan terhadap materi Perda tersebut.

Kedua : Materi muatan Perda disesuaikan dengan kewenangan yang dimiliki daerah sesuai dengan asas desentralisasi dan tugas pembantuan. Perda berisikan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas daerah. Dalam konteks ini, materi Perda ditafsirkan dan berisi rumusan lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan di atasnya. Selain itu, materi Perda juga dapat memuat hal-hal yang terkait dengan ciri khas daerah tersebut. Selain itu materi Perda juga harus memuat beberapa asas dalam pembentukan Perda yaitu; pengayoman; kemanusiaan; kebangsaan; kekeluargaan; kenusantaraan; Bhineka Tunggal Ika; keadilan; kesamaan kedudukan dalam hukum; dan pemerintahan; ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Ketiga : Sebagai salah satu produk peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia yang berada pada hierarki bawah, Perda dapat memuat ketentuan sanksi pidana dan denda yang jenis sanksinya lebih ringan daripada sanksi yang dimuat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam ketentuan Pasal 143 ayat (1), (2), dan (3) Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diatur mengenai sanksi yang dapat diatur dalam perda yaitu :

- Keempat* : Sebagai produk hukum yang dikeluarkan oleh Daerah dalam menjalankan tugasnya berdasarkan asas desentralisasi tugas pembantuan. Prosedur pembentukan, maupun materi Perda melalui verifikasi oleh Pemerintah Pusat sebagaimana ditegaskan Pasal 145 Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dianggap melanggar kepentingan umum dan/atau ber

dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat
oleh Pemerintah Pusat melalui Keputusan Presiden. Selambat-
setelah 7 (tujuh) hari sejak dibatalkan Kepala Daerah harus memb-
pelaksanaan Perda tersebut dan selanjutnya DPRD dan Kepala Da-
mencabut Perda tersebut.

Kelima : Setelah Perda dibuat dan dilaksanakan, m-
memiliki kesempatan untuk melakukan “kontrol” terhadap Per-

Sebelum mendefinisikan konsep peraturan syariah yang digunakan dalam penelitian ini, sangat penting untuk membangun perspektif dari pemahaman dasar tentang konsep syariah dalam Islam. Secara harfiah, istilah syariah berarti "jalan" yaitu "jalan menuju ke lubang berair" atau "jalan menuju air" atau "sumber air mancur kebaikan" dan "jalan menuju kesejahteraan atau kebaikan".³⁵

³⁵ K. A. El Fadl, *Conceptualizing shari`a in The Modern State*, Villanova Law Review. 2012, 807.

Syariah berasal dari kata *syarja*, berarti mengambil jalan yang memberikan akses pada sumber. Istilah syariah juga berarti jalan hidup atau cara hidup. Akar kata *syarja* dan turunannya dalam pengertian yang umum digunakan hanya dalam empat ayat Al-Qur`an.

³⁶ N. Baidawi, *Introduction to Islamic law (Working Paper)*. Retrieved from the International Humanitarian Law Research Initiative website, Program on Humanitarian Policy and Conflict Research, Harvard University, 2009, 03.

[illegible]

“Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Qur'an dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu”.

﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحٌ ۖ وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ ۝۱۳﴾

[illegible]

kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama) -Nya orang yang kembali (kepada-Nya)”.

Ketiga, QS. As-Syura Ayat 31,

وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ٣١

“Dan kamu tidak dapat melepaskan diri (dari adzab Allah) di muka bumi, dan kamu tidak memperoleh seorang pelindung pun dan tidak pula seorang penolong selain Allah.”

Keempat, QS. Al-Jatsiyah Ayat 18,

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ١٨

“Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama) itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui”.

Membicarakan syariah di republik ini memang suatu keniscayaan. Sebagai umat muslim, menaati syariah sebagai hukum Tuhan di muka bumi merupakan suatu kewajiban yang tidak bisa dibantah. Namun, pada sisi lainnya umat muslim sebagai bagian dari warga negara juga wajib menaati hukum nasional yang merupakan bentuk kesepakatan bersama antar elemen warga negara lainnya. Dalam konteks tersebut, pilihan Indonesia sebagai bentuk negara hukum (*rechstaat*) memberikan ruang inklusif bagi hukum

Agama Islam bersifat universal ('*alamy*'), mencakup semua manusia di dunia ini, tidak dibatasi oleh lautan maupun batasan suatu negara. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. Saba` ayat 28 dan QS. Al-Anbiya` Ayat 107 yang berbunyi :

QS. Saba` ayat 28,

“Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui”

“Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.”

Terdapat dua pendekatan dalam tatanan ilmu politik : *pertama*, pendekatan tradisional yang memiliki beberapa aspek yaitu historis yang memusatkan perhatiannya pada upaya untuk melacak dan menggambarkan berbagai fenomena legalistik yang memusatkan penelitiannya seputar konstitusi atau UUD. Institusional yang menganalisa tentang lembaga-

³⁸ Meriam Budiharjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*. (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), 4-

Dalam Kamus Ilmiah Populer, kata “Otonom” berarti “badan” (Daerah) yang mendapat hak otonomi. Sementara “Otonomi” sendiri mengandung arti mengurus diri (rumah tangga) sendiri; pelaksanaan pemerintahan sendiri.³⁹

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 ayat 6 UU No. 23 Tahun 2014). Pengertian "otonomi" secara bahasa adalah "berdiri sendiri" atau "dengan pemerintahan sendiri". Sedangkan "daerah" adalah suatu "wilayah" atau "lingkungan pemerintah".⁴⁰

⁴⁰ Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014

Dengan demikian pengertian secara istilah "otonomi daerah" adalah "wewenang kekuasaan pada suatu wilayah atau daerah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah masyarakat itu sendiri." Makna yang lebih luas lagi adalah wewenang atau kekuasaan pada suatu wilayah maupun daerah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah masyarakat itu sendiri mulai dari ekonomi, politik, dan pengaturan perimbangan keuangan termasuk pengaturan sosial, budaya, dan ideologi yang sesuai dengan tradisi adat istiadat daerah lingkungannya.

Sementara itu dalam konteks otonomi daerah, otonomi yaitu memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah secara proporsional, yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta potensi dan keanekaragaman daerah yang dilaksanakan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Pasal 10 UU No. 23 Tahun 2014 dipengaruhi oleh faktor-faktor yang meliputi kemampuan si pelaksana, kemampuan dalam keuangan, ketersediaan alat dan bahan, dan kemampuan dalam berorganisasi. Otonomi daerah tidak mencakup bidang-bidang tertentu, seperti politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, dan agama. Bidang-bidang tersebut tetap menjadi urusan

pemerintah pusat. Pelaksanaan otonomi daerah berdasar pada prinsip demokrasi, keadilan, pemerataan, dan keanekaragaman.

Pemberian otonomi daerah dari pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah bertujuan untuk menciptakan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan partisipasi masyarakat (*participatory democracy*) yang dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan keleluasaan kepada daerah untuk membentuk peraturan daerah sesuai dengan kondisi lokalistiknya.

Otonomi juga dimaksudkan untuk mendekatkan jarak antara pembuat peraturan daerah (pejabat daerah) dengan rakyat di daerahnya sehingga terbangun suasana komunikatif yang intensif dan harmonis diantara keduanya. Artinya keberadaan rakyat di daerah sebagai subjek pendukung utama demokrasi mendapat tempat dan saluran untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembentukan peraturan daerah bahkan sampai dengan tahapan pelaksanaan dan evaluasi peraturan daerah tersebut.

Otonomi daerah akan memberikan keleluasaan untuk merencanakan, membuat aturan maupun melaksanakan berbagai kewenangan dalam rangka untuk mewujudkan tujuan nasional di daerah. Otonomi juga mendorong lahirnya berbagai produk hukum yang bermuatan nilai-nilai lokal sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam suatu masyarakat. Nilai-nilai yang dimaksud secara garis besar dapat digolongkan dalam dua kategori, yaitu nilai-nilai yang bersumber pada ajaran agama yang melahirkan Peraturan Daerah syariah dan nilai-nilai lokal yang sering disebut sebagai kearifan

Adanya Perda syariah merupakan penguatan identitas Islam secara formal yaitu pada tahap ini, identitas Islam yang sebelumnya muncul sebagai perlawanan budaya berubah menjadi kekuatan politik dan ideologi. Perda syariah merupakan bentuk Islamisasi dibidang politik dengan menekankan simbol-simbol keIslaman.

[illegible]

tetapi pada tahap implementasi ajarannya memang Islam pada hal harus senantiasa menjadi spirit dari aktifitas kehidupan umat selanjutnya diaplikasikan dalam ranah kehidupan dan oleh beberapa Islam diamaknai dengan menerapkan Perda syariah ini.

HASIL PENELITIAN

Tabel 3.1 : Batas-batas Wilayah Kota Mojokerto

Wilayah	Keterangan
Sebelah Utara	Sungai Brantas
Sebelah Timur	Kecamatan Puri
Sebelah Selatan	Kecamatan Sooko dan Kecamatan Puri
Sebelah Barat	Kecamatan Sooko

Secara umum wilayah Kota Mojokerto dapat dibagi menjadi 3 kecamatan, 18 Kelurahan, 676 Rukun Tetangga (RT) dan 175 Rukun Warga (RW).³ Kota Mojokerto merupakan satu-satunya daerah di Jawa Timur, bahkan di Indonesia yang memiliki satuan wilayah maupun luas wilayah terkecil dengan kepadatan penduduk yang tinggi. Rincian wilayah Kota Mojokerto secara jelas dapat dilihat dalam tabel berikut :

³ *Ibid.*

Berdasarkan hasil registrasi penduduk akhir tahun 2017, Kota Mojokerto mempunyai penduduk sebanyak 142.625 jiwa yang tersebar di 3 kecamatan dan 18 kelurahan. Penduduk laki-laki sebanyak 70.729 jiwa atau sebesar 49,59% dan penduduk yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 71.896 jiwa atau sebesar 50,41%.⁴ Gambaran tersebut secara rinci dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.3 : Gambaran Penduduk Kota Mojokerto Tahun 2010

Berdasarkan Gender

Kecamatan/Kelurahan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Kec. Prajurit Kulon	20.898	21.134	42.032
Kel. Surodinawan	4.304	4.347	8.651
Kel. Prajurit Kulon	4.225	4.109	8.334
Kel. Blooto	3.167	3.139	6.306
Kel. Mentikan	3.671	3.884	7.555
Kel. Kauman	1.575	1.711	3.286

Kecamatan/Kelurahan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Kec. Prajurit Kulon	20.898	21.134	42.032
Kel. Surodinawan	4.304	4.347	8.651
Kel. Prajurit Kulon	4.225	4.109	8.334
Kel. Blooto	3.167	3.139	6.306
Kel. Mentikan	3.671	3.884	7.555
Kel. Kauman	1.575	1.711	3.286
Kel. Pulorejo	3.956	3.944	7.900
Kec. Magersari	30.036	30.393	60.429
Kel. Gunung Gedangan	3.679	3.671	7.350
Kel. Kedundung	8.037	7.772	15.809
Kel. Bolongsari	3.973	4.003	7.976
Kel. Gedongan	1.094	1.174	2.268
Kel. Magersari	2.917	3.084	6.001
Kel. Wates	10.336	10.689	21.025

⁴ *Ibid*, 65

Sumber : BPS Kota Mojokerto

3. Gambaran Pemerintahan

Jumlah wakil rakyat yang duduk pada lembaga legislatif, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebanyak 25 orang, dengan

Sejak era otonomi daerah, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di lingkungan Kota Mojokerto meningkat karena menerima pelimpahan dari pemerintah pusat, di mana beberapa pegawai yang sebelumnya berstatus pegawai pusat berubah menjadi pegawai daerah. Tahun 2017 jumlah ASN di Kota Mojokerto sebanyak 2.785 orang.

Penetapan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah serta Undang- Undang No. 25 tahun 1999 yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang

[illegible]

Undang-undang Otonomi Daerah dijadikan oleh beberapa daerah sebagai pintu masuk untuk menerapkan Syariat Islam. Jawa timur termasuk di dalam daftar provinsi yang pemerintah di beberapa kabupaten atau kotanya menerapkan PERDA Syariah. Ini menjadi fenomena yang sangat baik ketika melihat Jawa Timur sebagai basis religius yang sangat besar, termasuk 4 terbesar sebagai daerah regional yang banyak menerapkan peraturan daerah berbasis Agama salah satunya adalah Kota Mojokerto.

1. Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan zakat, infak, dan sedekah

Besarnya populasi umat muslim di Kota Mojokerto menjadi alasan utama diterbitkannya Perda Syariah di daerah tersebut, hal ini juga menjadi potensi keberadaan Perda syariah di Kota Mojokerto dapat dilaksanakan secara optimal. Lahirnya PERDA syariah di Kota Mojokerto juga diyakini sebagai salah satu dimensi pemberdayaan potensi keislaman masyarakat Kota Mojokerto yang diejawentahkan melalui hasil elaborasi pemerintah dengan masyarakat dalam sebuah PERDA, modal tersebut cukup menjadi peluang untuk menciptakan kebersamaan dalam memberlakukan syariat Islam di daerah ini. Gambaran penerapan Perda Syariah di Kota Mojokerto dalam bidang ekonomi dan keuangan sebagai berikut :

- [illegible]

ZIS di Kota Mojokerto ini dilatarbelakangi adanya keadaan Masyarakat Kota Mojokerto yang mayoritas muslim namun kurang sadar akan penting ZIS, hal ini senada dengan pendapat Ma'shum Maulani selaku Kepala BAZ Kota Mojokerto yaitu :

Dalam hal pengelolaan ZIS, DPRD Kota Mojokerto telah menerbitkan dua buah Perda yaitu Perda No. 3 tahun 2010 sebagai asas dan dasar pengelolaan ZIS yang ditetapkan pada tanggal 11 Oktober 2010 dan Perwali No. 14 tahun 2013 tentang pedoman teknis pengumpulan dan/atau pemungutan ZIS yang ditetapkan pada tanggal 25 Maret 2013. Hadirnya Perda pengelolaan ZIS di Kota Mojokerto ini bertujuan untuk 1) meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan

dalam upaya mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, 2) memperbaiki dan/atau meningkatkan taraf hidup masyarakat, 3) meningkatkan daya guna dan hasil guna zakat, infak, dan sedakah.

Pemungutan dan/atau pengumpulan dana ZIS di Kota Mojokerto dilakukan oleh badan yang disebut Badan Amil Zakat (BAZ) yang ditetapkan dengan keputusan Walikota atas dasar usulan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Mojokerto. Dalam penerapannya BAZ Kota Mojokerto membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang terdiri dari setiap instansi pemerintah, badan usaha, dan organisasi kemasyarakatan yang dimaksudkan dalam rangka pengumpulan ZIS di lingkungan kerja masing-masing.

Dalam hal pemungutan ZIS, koordinator UPZ terlebih dahulu menyebarkan formulir (isian) mengenai kesediaan menyetorkan zakat kepada para muzakki, munfiq dan mushodiq. Selanjutnya berdasarkan formulir yang telah ditandatangani, koordinator UPZ dapat menerima uang atau memotong gaji setiap bulan sebesar kewajiban membayar zakat, infak dan sedekah sebagaimana terhitung. Sedangkan bagi masyarakat yang menyetorkan zakat, infak, dan sedekahnya secara sendiri-sendiri atau tidak melalui koordinator UPZ, maka pengisian formulir dan penyetoran dapat dilakukan langsung di kantor BAZ Kota Mojokerto.

“Dalam penerapannya, perda terkait ZIS ini hanya dapat menjadi himbauan bagi masyarakat luas, namun dikalangan birokrasi pemerintahan kita bisa mengikat dengan adanya perda ini. Di lapangan kami mencoba melakukan komunikasi dengan para pimpinan birokrasi agar para pegawainya dapat menunaikan kewajiban zakatnya dengan mekanisme pemotongan langsung dari nilai gaji mereka dengan mekanisme komunikasi bertahap”.⁷

Ada beberapa ketentuan ZIS yang berlaku bagi masyarakat Kota Mojokerto yang ditentukan dalam Perda No. 3 Tahun 2010 ini yaitu :

- a. Muzakki melakukan perhitungan sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya berdasarkan ketentuan hukum Islam, jika Muzakki tidak dapat menghitung sendiri maka Muzakki dapat meminta bantuan kepada BAZ Kota Mojokerto.
- b. Dalam hal infak dan sedekah, BAZ Kota Mojokerto menetapkan prioritas Munfiq dan Mushodiq kepada anggota DPRD Kota

[illegible]

“Secara fundamental, untuk memberikan permodalan kepada masyarakat kota Mojokerto khususnya dan masyarakat Jawa Timur umumnya agar mereka dapat meningkatkan kesejahteraan dari sektor perekonomian”.⁸

⁸ Arif Zakarya, *Wawancara*, Kantor BPRS Mojokerto, 01 Juli 2019.

Pemerintah Kota Mojokerto dalam hal ini meyakini bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki arti penting dan peranan serta kedudukan yang strategis dalam menopang ketahanan ekonomi masyarakat dan sebagai wahana penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat Kota Mojokerto. Oleh karena itu, pemerintah Kota Mojokerto menerbitkan Perda No. 7 tahun 2009 tentang Pemberdayaan UMKM di Kota Mojokerto yang ditetapkan pada tanggal 29 Juni 2009. Dalam pasal 3 dijelaskan bahwa tujuan perlu dilakukannya pemberdayaan UMKM bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan UMKM dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

Dalam penerapannya, pemerintah Kota Mojokerto bertugas sebagai berikut yaitu, 1) melakukan pembinaan untuk memberdayakan UMKM, 2) membantu menyediakan dana guna meningkatkan permodalan UMKM, 3) mengatur sentra-sentra UMKM, 4) menjadi mitra UMKM, 5) melakukan pendataan UMKM, dan 6) memberikan perlindungan usaha terhadap UMKM yang ada di wilayah Kota Mojokerto.

Dalam perkembangannya, berlandaskan Perda No. 7 Tahun 2009 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Mojokerto memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi Kota Mojokerto karena mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan mempengaruhi pendapatan masyarakat sehingga mampu mengurangi pengangguran dan kemiskinan di Kota Mojokerto. Pada perkembangannya UMKM Kota Mojokerto memiliki produk-produk unggulan yang menjadi ciri khas sebagai berikut :

Tabel 3.4 : UMKM Unggulan Kota Mojokerto Tahun 2018

Jenis Komoditi	Total Usaha	Total Pekerja	Total Nilai Produksi
Usaha Berbasis Agro	482 Unit	1.633	Rp. 53.094.792.000
Usaha Alas Kaki	399 Unit	4.133	Rp. 287.050.208.800
Usaha Batik Tulis dan Cap	66 Unit	89	Rp. 624.600.000

Usaha Handicraft	52 Unit	207	Rp. 4.576.700.000
Usaha Miniatur Perahu	13 Unit	35	Rp. 1.254.800.000
Usaha Cor Aluminium	11 Unit	98	Rp. 9.981.900.000

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto, 2018

Berdasarkan tabel di atas, usaha UMKM berbasis agro seperti makanan dan minuman adalah yang paling banyak dan tersebar merata di Kota Mojokerto dengan total usaha sebesar 482 unit namun hanya mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 1.633 orang dengan total nilai produksi sebesar Rp. 53.094.792.000. Sementara, produk unggulan UMKM Kota Mojokerto yang paling terkenal adalah usaha alas kaki dengan total usaha sebesar 399 unit yang mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 4.133 orang dengan total nilai produksi paling besar yaitu Rp. 287.050.208.800. Namun, untuk usaha batik tulis dan cap adalah yang paling sedikit dengan hasil total nilai produksi sebesar Rp. 624.600.000 dan total usaha sebesar 66 unit yang hanya mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 89 orang.

Selain itu, pada UMKM Kota Mojokerto terdapat usaha *handicraft* yaitu berupa pembuatan aksesoris, kerajinan tas, sulam pita, dan kerajinan bambu yang mulai banyak diminati masyarakat sehingga menghasilkan total nilai produksi sebesar Rp. 4.576.700.000 dengan 52

unit usaha yang mampu menyerap tenaga kerja sebesar 207 orang. UMKM Kota Mojokerto lainnya adalah usaha miniatur perahu yang unik dan hanya ada disalah satu daerah Kota Mojokerto yakni Kelurahan Miji yang hanya memiliki 13 unit usaha dengan 35 tenaga kerja namun memiliki total nilai produksi yang besar yaitu sebesar Rp. 1.254.800.000.

Namun demikian, perkembangan UMKM Kota Mojokerto belum dapat berkembang dengan pesat. Hal tersebut dikarenakan masih sedikitnya unit usaha yang berdiri serta kurangnya tenaga kerja sehingga mengakibatkan total nilai produksi yang dihasilkan masih belum maksimal. Oleh karena itu, diperlukan program-program khusus yang diberikan kepada para pengusaha mikro, kecil dan menengah sebagai upaya dalam mendukung perkembangan UMKM Kota Mojokerto di masa yang akan datang.

ANALISIS DATA

Berbagai langkah kongkrit dilakukan pemerintah Kota Mojokerto dalam menurunkan angka kemiskinan. Salah satu yang diyakini cukup efektif adalah memberikan akses permodalan kepada keluarga miskin yang umumnya hidup dengan menggantungkan pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Karena itu, pemerintah membuat program pemberdayaan UMKM seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan subsidi bunga, kredit agrobisnis, kredit pendorong ekspor, dan sebagainya. Telah banyak program pemberdayaan UMKM yang dilakukan pemerintah, namun jumlah UMKM yang sangat besar membuat banyak UMKM yang belum terjangkau pemberdayaan, karena itulah, banyak lembaga bisnis seperti bank, bank syariah, bank perkreditan rakyat (BPR), BPR Syariah, dan lembaga keuangan mikro seperti koperasi jasa keuangan, baitul maal wa tamwil, koperasi kredit, dan sebagainya juga menekuni pemberdayaan UMKM melalui berbagai pembiayaan usaha.

[illegible]

Tabel 4.2 : Perkembangan Jumlah Muzakki Tahun 2016 - 2018

No	Jenis Muzakki	Jumlah Muzakki Zakat Maal			Pertumbuhan
		2016	2017	2018	
1	UPZIS	2.699	2.997	3.033	1%
2	MASYARAKAT	402	596	706	18%
TOTAL		3.101	3.593	3.739	4%

Sumber : Laporan Tahunan BAZNAS Kota Mojokerto Tahun 2018

Sedangkan laporan kegiatan pendistribusian ZIS oleh BAZNAS Kota Mojokerto pada tahun 2018 menunjukkan bahwa nilai dana yang telah didistribusikan senilai 1,942,484,203.00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.3 : Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Tahun 2018

No	Ashnaf / Program Sasaran	Jumlah
1	Fakir Miskin	1,436,892,000.00
2	Ibnu Sabil	100,000.00
3	Sabilillah	118,735,800.00
4	Amil	300,091,839.00
5	Program Pusyar	84,109,375.00
6	Jasa Bank	2,555,189.00
	TOTAL	1,942,484,203.00

Sumber : Laporan Tahunan BAZNAS Kota Mojokerto Tahun 2018

Terbitnya UU No. 23 tahun 2011 mengenai zakat juga menambah peran penting pemerintah dalam mensosialisasikan zakat. UU tersebut juga memungkinkan pendistribusian dana ZIS berkembang, dari yang hanya

berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar *mustahiq* (konsumtif) sampai pada zakat sebagai sumber dana produktif yang dapat meningkatkan perokonomian.

Secara konsep, ZIS memang dapat digunakan sebagai instrumen kebijakan ekonomi untuk mempersempit kesenjangan ekonomi antara yang kaya dan yang miskin. Zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh orang Islam yang mampu (*muzakki*) dan didistribusikan untuk golongan yang berhak menerima zakat (*mustahiq*).¹ Hafiddudin menjelaskan bahwa zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.²

Realita dan data di atas merupakan bukti positif lantaran pemerintah Kota Mojokerto menerbitkan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2009 tentang pemberdayaan UMKM, dan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2013 tentang Pendirian BPR Syariah serta Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2010 tentang pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah yang kemudian didukung dengan adanya Peraturan Walikota No. 14 Tahun 2013 tentang pedoman teknis pengumpulan zakat, infaq, dan sedekah. Kemudian rentetan regulasi ini dijadikan payung hukum program usaha syariah (PUSYAR) yang diyakini

¹ Muhammad Nafik H.R., *Ekonomi ZISWAQ*, (Surabaya: Islamic Finance Development Institute (IFDI), 2009), 45

² Didin Hafidhuiddin. 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani, 2002, 01

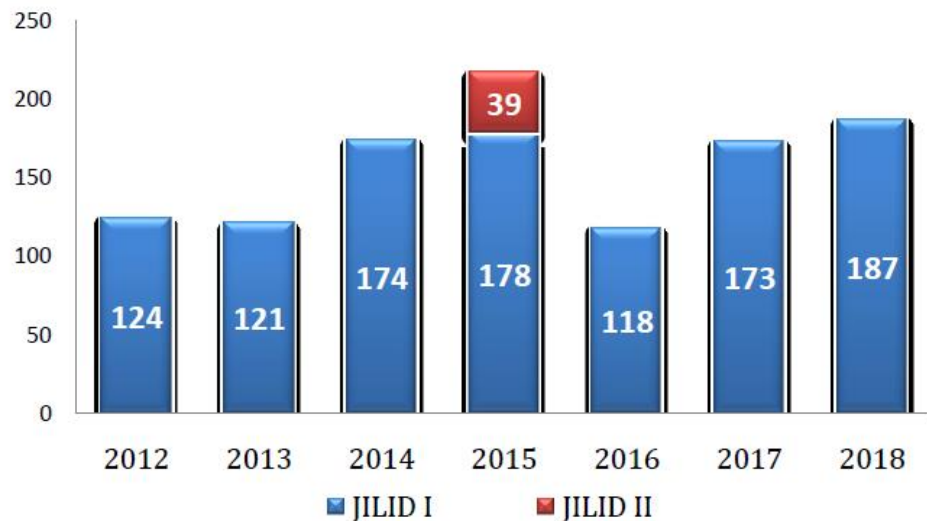
dapat mengurangi kesenjangan yang terjadi di Kota Mojokerto melalui pemberdayaan UMKM.

Program Pusyar ini memberikan Pinjaman Modal kepada UMKM Kota Mojokerto dengan sistem syari'ah (Akad *Murābahah*). Sedangkan biaya *ujroh*/ margin, biaya administrasi dan asuransi ditanggung oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Mojokerto yang diambilkan dari Dana Infak dan Sedekah. Dalam hal ini pihak BAZNAS Kota Mojokerto memberikan biaya *ujroh*/ margin, biaya administrasi dan asuransi sebesar 15% kepada Peserta Program Pusyar. Sesuai dengan ketentuan Program PUSYAR bahwa Peserta Program PUSYAR Jilid I dapat melakukan pinjaman mulai dari Rp. 750.000,- s/d Rp. 10.000.000,-. Sedangkan PUSYAR Jilid II dapat melakukan pinjaman mulai Rp. 10.000.000,- s/d Rp. 50.000.000,- Besar-kecilnya pinjaman tergantung jenis usaha dan ketentuan BPRS yang berlaku.

Sampai periode bulan Januari 2018 s.d. Desember 2018, biaya ujroh/margin, biaya administrasi dan asuransi yang dikeluarkan oleh BAZNAS sebesar Rp. Rp. 84,109,375,- (Delapan puluh empat juta seratus sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) untuk 187 UMKM Peserta Program Pusyar sebagaimana grafik berikut ini :

Grafik 4.1 : Jumlah Penerima Manfaat Program Pusyar

Tahun 2012 - 2018



Sumber : Laporan Tahunan BAZNAS Kota Mojokerto Tahun 2018

Dari dana sebesar 3 Milyar yang disediakan oleh BPRS Kota Mojokerto sampai akhir tahun Realisasi Pencairan PUSYAR terserap sebesar 84,109,375,- (Delapan puluh empat juta seratus sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah). Berikut Rekapitulasi Realisasi Pencairan PUSYAR dari mulai Tahun 2012 s/d 2018 yang mencapai angka 8,956,909,375.

Bagian ini mendeskripsikan konsep utama atas analisa ekonomi politik suatu kebijakan peraturan daerah, konsep utama tersebut adalah para pelaku kebijakan, dan konsep ini merujuk pada mereka yang terlibat dalam proses difusi kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan konsep aktor kebijakan sebagaimana didefinisikan oleh Graham, Shipan, dan Volden yang mengklasifikasikan pelaku kebijakan ke dalam tiga kategori: aktor internal, aktor eksternal, dan pihak perantara. Aktor internal merujuk pada pihak-pihak pembuat kebijakan di dalam pemerintahan yang mengadopsi kebijakan baru.³

pihak-pihak pembuat kebijakan di dalam pemerintahan yang mengadopsi kebijakan baru.³

Tipe aktor internal yang dimaksud adalah Walikota Kota Mojokerto dan anggota legislatif lokal yang tertarik untuk mengadopsi kebijakan baru. Kemudian aktor eksternal mengacu pada mereka para pembuat kebijakan di luar yurisdiksi dari mana kebijakan baru menyebar, mereka adalah walikota Kota Mojokerto, pejabat pemerintah atau dinas terkait, dan akademisi.

Inisiasi awal mula terciptanya Pusyar ini adalah dari pihak pemerintah Kota Mojokerto dan pada waktu itu belum berdiri BPRS, dan kemudian banyak pedagang yang terjerat oleh rentenir, dan kemudian pak walikota sebagai inisiator dari program Pusyar ini mencetuskan program ini untuk membantu para pedagang-pedagang tersebut. Pihak-pihak yang terkait dalam program ini adalah pemerintah kota mojokerto, BAZNAS, BPRS, MES, DISKOMINAKER dan DISPERINDAG. Sebagaimana Ma`shum Maulani menjelaskan perihal histori lahirnya program Pusyar ini.

“Lahirnya Pusyar ini diinisiasi langsung oleh wakil walik berkeinginan membangun ekonomi kerakyatan secara ma BAZNAS memiliki program hibah modal namun nilai peny relatif kecil karena waktu itu dana yang dihimpun BAZN waktu itu program hibah modal ini memiliki dana 15 bilamana jika kita berikan modal kepada mereka yan sebesar 10.000.000 maka hanya akan dapat mengcov nasabah/orang, kemudian kita mulai berpikir kembali ba dana yang sedikit ini dapat membantu masyarakat banyak. ide untuk bekerjasama dengan BPRS dan lahirlah program baznas berperan sebagai penanggung biaya administrasi

Secara sistem mekanisme penyaluran dana Pusyar adalah dana infak yang telah dikumpulkan oleh BAZ tersebut diserahkan kepada BPRS, dan kemudian pihak BPRS menyalurkan dana tersebut kepada para pelaku usaha UMKM dengan proses seleksi sesuai aturan yang dikeluarkan oleh OJK, kemudian akad yang digunakan BPRS adalah akad murabahah, jumlah dana yang disalurkan BPRS sebesar 750.000-10.000.000 dengan margin 15 % ditanggung oleh BAZNAS tanpa bunga, asuransi, dan uang administrasi dan jangka waktu pengembalian selama 12-18 bulan. Kemudian MES dan DISKOMINAKER serta DISPERINDAG bersama-sama membina dan memberikan pendampingan kepada para pelaku usaha UMKM yang telah diberikan dana PUSYAR agar dana yang diterima oleh para pelaku usaha tersebut dikelola dengan baik.

[illegible]

Tabel 4.5 : Peran dan Tanggung jawab Stakeholder yang terlibat dalam Program Pusyar

[illegible]

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Hadirnya Peraturan Daerah bernuansa syariah di Kota Mojokerto tidak luput dari keberadaan kebijakan otonomi daerah yang memberikan ruang kepada pemerintah Kota Mojokerto untuk mengelola daerahnya dengan efisien dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya. Dalam penerapannya, Perda Syariah di Kota Mojokerto dalam bidang ekonomi dan keuangan melahirkan sebuah Program Usaha Syariah (PUSYAR) yang diyakini mampu menjadi instrumen produktif dalam mengentaskan kemiskinan melalui pemberdayaan UMKM yang ada di wilayah Kota Mojokerto, program ini telah memberdayakan 1.114 UMKM yang ada di Kota Mojokerto dengan total pendistribusian dana dari tahun 2012 – 2018 mencapai angka Rp. 8,956,909,375.
2. Berdasarkan tinjauan ekonomi politik dan keuangan, penerapan Peraturan Daerah Syariah di Kota Mojokerto melibatkan peran aktor-aktor politik pemerintah Kota Mojokerto seperti BPRS, BAZNAS, DISKOMINAKER, DISPERINDAG, dan MES yang berusaha melahirkan langkah kongkrit mempersempit kesenjangan yang terjadi

Pemerintah Daerah dan Anggota Dewan Kota Mojokerto hendaknya menentukan sanksi pidana bagi masyarakat terkait Perda No. 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dana ZIS dan lebih mengintensifkan dialog baik secara internal atau pun dengan masyarakat umum untuk mempersamakan persepsi agar penerapan syariat Islam di Kota Mojokero dapat berjalan lebih efektif utamanya di bidang ekonomi dan keuangan (*Mu'āmalah*).

Laporan Tahunan BAZNAS Kota Mojokerto Tahun 2018

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

M.B. Hooker, *Indonesian Syari'at: Defining a National School of Islamic Law* (Singapore: Institute of Southeast Asia Studies, 2008).

Manan, Bagir, *Dasar-dasar Perundang-Undangan Indonesia*, (Jakarta; Ind-Hill.co, 1992).

Manan, M. Abdul, (terj), *Ekonomi Islam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Internasa, 1992),

Muhtada, Dani, *The Mechanisms of Policy Diffusion: A Comparative Study of Shari'a Regulations in Indonesia*, Dissertation Submitted to The Graduate School. Department of Political Science, Northern Illinois University, 2013

Moeleong, J, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005).

Munawar, Ahmad, *Fenomena Perda Syariah: Institusi Identitas pada Tingkat Local State*. Jurnal Sosiologi Agama, Vol. 01 No. 1, Juni 2007,

Musfiquon, H. M, *Panduan Lengkap Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2012).

Mustafa, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Nasution, 2007).

Nafik H.R, Muhammad, *Ekonomi ZISWAQ*, (Surabaya: Islamic Finance Development Institute (IFDI), 2009).

- Narbuko, *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004).
- Nasir, Mohammad, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988).
- PAKEM Badan Kebijakan Fiskal KEMENKEU, *Laporan Kajian Islamic Public Finance*, 2012.
- Peraturan Daerah Kota Mojokerto No. 3 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah.
- Peraturan Daerah Kota Mojokerto No. 10 Tahun 2013 Tentang Pendirian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto.
- Peraturan Daerah Kota Mojokerto No. 7 Tahun 2009 Tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Peraturan Walikota Mojokerto No. 14 Tahun 2013 Tentang Pedoman Teknis Pengumpulan dan/atau Pemungutan Zakat, Infak, dan Sedekah
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008).
- Pisani, *Why do Indonesian Politicians Promote Sharia Law? An Analytic Framework For Muslim Majority Democracies*. Journal of Third World Quarterly, 2016.
- Pembukaan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Rachbini, Didin J, *Ekonomi Politik: Paradigma dan Teori Pilihan Publik*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002)
- Rumadi, *PERDA Syariat Islam: Jalan Lain menuju Negara Islam?*, Tashwirul Afkar, Jurnal Refleksi Pemikiran Keagamaan dan

Kebudayaan; *PERDA Syariat Menuai Makna*, Edisi No 20 tahun 2006.

Syakir, Mohd Rosdi, *Ekonomi Politik Islam: Teori dan Falsafah*. (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2013).

Syauqi Beik, Irfan, dkk, *Ekonomi Pembangunan Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016).

Taurusman, Situmeang, *Proyek Penanggulangan Kebijakan Penanganan Kemiskinan Di Perkotaan; Studi Implementasi Kebijakan Proyek Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan Di Desa Jatikerto Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang*, Jurnal Reformasi, Volume 3, Nomor 1, Januari – Juni 2013.

Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintah Daerah Sebagai Pelaksana Otonomi Daerah.

Winarno, Budi, *Kebijakan Publik Teori dan Proses*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2002).